

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2004

TAHUN : 2004



NOMOR : 10

S E R I : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 06 TAHUN 2004

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KOTA BANDUNG TAHUN 2004-2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah, setiap daerah wajib menetapkan Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan daerah yang disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai tolak ukur penilaian Kepala Daerah;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka Pemerintah Kota Bandung perlu menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf b di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor:IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Negara);
3. Undang-undang Nomor 04 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 jo. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Darah Tingkat II Bandung;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
19. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung 07 Tahun 2000 tentang Pengembangan dan Penataan Kawasan Inti Pusat Kota;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2004-2013

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KOTA BANDUNG 2004-2008

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis (Renstra) adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, program dan kegiatan daerah yang merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah dengan mengacu pada pola dasar pembangunan daerah dan program pembangunan daerah serta indikator analisis tentang situasi, PDRB dan proyeksi pertumbuhan ekonomi, indeks regional, dan kebijakan jangka menengah yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sebagai acuan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
- (2) Untuk memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh, maka sistematika Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : KONDISI UMUM
BAB III : VISI DAN MISI
BAB IV : CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN (STRATEGI)
BAB V : PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA
BAB VI : PENUTUP

Pasal 2

Isi beserta uraian berikut matriknya sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) terdapat dalam Naskah Rencana Strategis Kota Bandung Tahun 2004-2008, tercantum dalam Lampiran I dan II.

Pasal 3

Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008 sebagaimana dimaksud Pasal 1 merupakan pedoman taktis strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Bandung yang akan dilaksanakan dalam periode Tahun 2004-2008.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

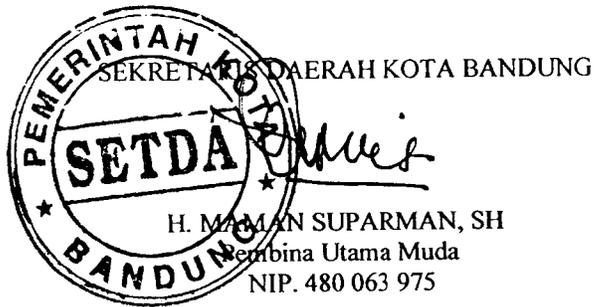
Disahkan di Bandung
pada tanggal 3 Maret 2004

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 3 Maret 2004



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2003 NOMOR 10 SERI D

NOMOR : 06 TAHUN 2004
TANGGAL : 3 MARET 2004

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KOTA BANDUNG TAHUN 2004-2008**

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Kota Bandung sebagai bagian integral dari pembangunan regional dan nasional pada hakekatnya merupakan suatu proses yang bersifat integratif baik dalam tataran perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat ruang lingkungannya yang sangat luas, kegiatan pembangunan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan harus dilakukan dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, hubungan kemitraan pemerintah dengan masyarakat merupakan kata kunci yang sangat strategis dan harus menjadi fokus perhatian terutama untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam pembangunan. Kemitraan yang dijalin dan dikembangkan tentunya harus berdasar pada aspek dan posisi kesejajaran yang bersifat demokratis dan proporsional. Implikasinya adalah bahwa pembangunan kota harus direncanakan, dilaksanakan dan dikendalikan oleh seluruh warga masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah kota.

Untuk membangun komitmen dan keinginan dimaksud sesuai tugas, peran dan fungsi yang harus dilakukan, pemerintah kota Bandung harus merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Kebijakan pemerintah Kota dalam periode lima tahun ke depan (2004-2008) dirumuskan dan dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah guna mengantisipasi berbagai isu-isu yang diperkirakan terjadi baik yang berupa tantangan, kendala maupun peluang berdasarkan potensi, kewenangan serta kemampuan yang dimiliki. Pelaksanaan otonomi daerah saat ini telah memberi peluang pada pemerintah Kota Bandung untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang lebih luas dalam rangka mengurus rumah tangga daerah. Pada saat yang sama, masyarakatpun diberikan peluang yang lebih besar untuk mengembangkan aspirasi dan prakarsanya dalam rangka pembangunan daerah. Peranan masing-masing pihak ini pada akhirnya harus menjelma menjadi suatu kekuatan besar untuk mengelola daerah, khususnya dalam mengantisipasi dan mengatasi isu-isu strategis yang berkaitan dengan perkembangan daerah baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Salah satu konsekuensi logis dari posisi serta kondisi tersebut, maka pemerintah Kota Bandung harus mampu meningkatkan kualitas kinerja khususnya dalam memberikan pelayanan publik baik dalam kerangka perwujudan kesejahteraan masyarakat maupun strategi untuk menghadapi era persaingan global. Kinerja pelayanan yang baik pada akhirnya akan menjadi faktor pendorong dan atau pendukung terhadap pertumbuhan serta perkembangann kota.

Untuk mewujudkan kinerja pelayanan yang sesuai dengan potensi, tantangan, kendala dan peluang yang ada, maka disusun Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008 sebagai pedoman dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, serta digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan APBD serta sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD.

B. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Renstra

1. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kota Bandung adalah untuk memberikan arah bagi seluruh dimensi kebijakan Pemerintah Kota Bandung pada periode tahun 2004-2008 serta sebagai pedoman taktis dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan publik di Kota Bandung.

2. Sasaran

Sasaran penyusunan Rencana Strategis Kota Bandung adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalkan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif.

C. Landasan Hukum

1. **Landasan Idiil** : Pancasila
2. **Landasan Konstitusional** : Undang-undang Dasar 1945
3. **Landasan Operasional**:
 - a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004;
 - e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
 - j. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar (POLDAS) Pembangunan Kota Bandung Tahun 2000-2004;
 - k. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
 - l. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Bandung tahun 2000-2004;
 - m. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Program Rencana Tata Ruang Rencana Wilayah (RTRW) Kota Bandung tahun 2004-2013.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung disusun sebagai berikut :

- | | |
|-----------------|---|
| Bab Satu | PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang latar belakang, tujuan, sasaran dan landasan hukum penyusunan serta sistematika penulisan Rencana Strategis. |
| Bab Dua | KONDISI UMUM
Bab ini menguraikan tentang kondisi umum Kota Bandung yang meliputi: potensi, kendala dan tantangan, peluang serta isu-isu strategis pembangunan kota. |
| Bab Tiga | VISI DAN MISI
Bab ini menguraikan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran dari masing-masing misi kota. |

- Bab Empat** **CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN (STRATEGI)**
Bab ini menguraikan tentang arah kebijakan, program dan indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2004-2008.
- Bab Lima** **PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA**
Bab ini menguraikan tentang cara pengukuran dan evaluasi kinerja serta kesimpulan hasil evaluasi.
- Bab Enam** **PENUTUP**
Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari Renstra secara keseluruhan.

KONDISI UMUM

A. Potensi

Potensi adalah kemampuan, kekuatan, kesanggupan, dan daya yang dimiliki oleh Kota Bandung yang memungkinkan untuk dikembangkan, digali dan dijadikan sebagai sarana untuk membangun kota.

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Potensi SDM adalah kemampuan atau kekuatan SDM yang terdapat dan dimiliki oleh Kota Bandung. Kota Bandung dikenal sebagai kota dengan nuansa pendidikan, budaya, sosial, ekonomi, pusat industri, teknologi dan jasa yang telah banyak mencetak ahli dalam berbagai bidang termasuk tersedianya pemuka-pemuka agama dan agamawan. SDM dengan kemampuan tersebut merupakan potensi yang sangat besar bila dapat dimanfaatkan secara tepat untuk membantu mewujudkan Kota Bandung yang BERMARTABAT.

2. Perekonomian

Kondisi perekonomian Kota Bandung yang bercirikan struktur perekonomian urban atau kota yang tengah mengalami perbaikan dan peningkatan dalam semua sektor. Hal ini dapat dilihat indikasinya dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung yang mengalami pertumbuhan tinggi, yaitu pada masa awal krisis (1998) LPE sebesar -19,69%. Seiring dengan pulihnya perkeekonomian pada tingkat nasional dan regional, pertumbuhan ekonomi Kota Bandung sejak tahun 2000 mengalami perbaikan dan peningkatan positif sebesar 5,41% pada tahun 2000, 7,57% pada tahun 2001 dan pada tahun 2002 sebesar 7,13%. Tingkat Inflasi pada periode tersebut adalah sebesar 5,05% pada tahun 2000, 11,26% pada tahun 2001 dan 11,09% pada tahun 2002 dengan tingkat pengangguran pada tahun 2002 adalah sebesar 8,84% dari jumlah penduduk angkatan kerja.

Dalam konteks pembangunan, perekonomian merupakan sektor yang menjadi salah satu indikator keberhasilan suatu negara, wilayah maupun pemerintah. Barometer potensi tersebut dinilai bagaimana pemenuhan kebutuhan barang dan jasa warga masyarakat suatu wilayah (kota/kabupaten) tersebut. Dalam pemahaman sebagai potensi, perekonomian harus mendukung faktor-faktor pembangunan kota itu sendiri, seperti pendukung pembangunan di sektor infrastruktur dan suprastruktur (prasarana dan sarana) pendukung regulasi pemerintah, pelayanan kepada masyarakat serta pembangunan pendukung kegiatan perekonomian kemasyarakatan, seperti pembangunan dengan pengarah dan penyusunan sentra-sentra ekonomi tertentu (perdagangan dan jasa).

Struktur ekonomi Kota Bandung pada tahun 2002 terdiri atas: pertama, sektor primer yang berkontribusi 0,40% terhadap produk domestik regional bruto (PDRB); kedua, sektor sekunder yang berkontribusi 39,86% terhadap PDRB; dan ketiga, sektor tersier (jasa) yang berkontribusi 59,74% terhadap PDRB. Dari struktur ekonomi tersebut, menunjukkan bahwa sektor tersier (jasa) merupakan sektor yang dominan dalam struktur ekonomi kota. Sektor tersier ini terdiri atas: sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, lembaga keuangan, persewaan, jasa-jasa perusahaan serta jasa pemerintahan.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tersebut telah berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kota. Hal ini ditunjukkan dengan makin meningkatnya rata-rata pendapatan per kapita masyarakat yaitu pada tahun 2000 sebesar Rp. 6.834.500,00, tahun 2001 sebesar Rp. 7.317.265,00 dan pada tahun 2002 sebesar Rp.7.851.319,00.

3. Sosial Budaya

Dalam pemahaman potensi dari segi sosial budaya, Kota Bandung sebagai kota yang tengah membangun dan menjadi kota metropolitan, tentunya mempunyai potensi sosial budaya yang cukup signifikan dalam upaya mewujudkan Kota Bandung sebagai kota yang bermartabat.

- (1) Faktor multi etnik, kultur/budaya yang muncul sejalan dengan perkembangan kota, bila dikoordinasikan secara apresiatif dan akulturatif akan dapat membentuk suatu tatanan masyarakat kota Bandung yang berwawasan luas dan dapat menjadi model dalam pembentukan masyarakat metropolitan;
- (2) Dengan adanya dimensi dinamisasi, keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat dalam semua lini dan tingkatan pembangunan kota Bandung, maka hal tersebut dapat menjadi kontribusi positif pendorong dalam pembangunan itu;
- (3) Tingginya kreativitas dan inovasi warga Kota Bandung untuk mendorong kemajuan pembangunan;
- (4) Berkembangnya masyarakat madani yang menggali potensi agama sebagai bagian mendasar dari aspek kehidupan beragama dan bermasyarakat;
- (5) Integrasi sosial multi dimensi yang terbentuk pada tatanan kehidupan bermasyarakat Kota Bandung menunjukkan bahwa integrasi sosial dapat mewujudkan kondisi-kondisi sesuai dengan harapan, dimana barometer integrasi sosial tersebut ditunjukkan dengan keamanan, ketertiban, ketenteraman dan situasi yang relatif terkendali menyangkut hubungan SARA.

4. Penataan Kota

Kota Bandung secara fisik memiliki iklim yang sejuk dengan curah hujan yang tinggi serta tanah yang subur bagi budidaya pertanian. Dalam perspektif sejarah, Kota Bandung merupakan kota peristirahatan yang telah berubah fungsi menjadi salah satu kota metropolitan.

Berbagai prasarana dan sarana fisik kota telah terbangun mengikuti berbagai tuntutan perkembangan aktivitas kotanya. Bangunan-bangunan fisik tersebut mulai dari prasarana dan sarana pelayanan pemerintahan, pendidikan, penelitian, perdagangan, lembaga keuangan sampai dengan sarana penunjang lainnya seperti: saluran drainase kota, jalan-jalan kota, serta prasarana dan sarana persampahan.

Namun demikian, kondisi perkembangan fisik kota Bandung saat ini belum menunjukkan keteraturan yang cukup menunjang pencapaian visi kota. Kepadatan penduduk yang tinggi yaitu sebesar 11.200 jiwa per km² pada tahun 2002 dianggap sebagai salah satu penyebab ketidaksepadanan dalam pelayanan infrastruktur dan utilitas kota.

5. Pemerintahan

Dalam bidang pemerintahan, keberadaan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 merupakan potensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Perubahan paradigma pembangunan yang lebih mengedepankan peran serta masyarakat akan menjadi pemacu pertumbuhan dan perkembangan pembangunan.

Dari aspek kehidupan politik masyarakat, Kota Bandung telah menjadi barometer kehidupan politik nasional. Di Kota Bandung relatif tidak pernah terjadi gejolak yang berhubungan dengan masalah politik. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat dan peran Pemerintah Kota Bandung dalam mensosialisasikan dan menanamkan pemahaman perilaku politik yang kondusif dan kondusif.

6. Pendapatan

Pendapatan Pemerintah Kota merupakan bagian yang paling strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pendapatan kota merupakan salah satu aspek yang menjadi tolok ukur peningkatan kinerja pemerintah. Efektivitas pengalokasian biaya pembangunan pada penyelenggaraan pelayanan publik akan mendorong peningkatan investasi sektor swasta dan masyarakat dalam pembangunan.

Pendapatan pemerintah kota dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cukup berarti, dan menjadi indikator peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat kota. Partisipasi masyarakat dan swasta dalam membantu pencapaian pendapatan tersebut telah tumbuh dan berkembang seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi kota, baik dalam bentuk swadaya masyarakat maupun kemitraan pemerintah dengan swasta.

B. Kendala dan Tantangan

1. Rendahnya Daya Saing

Menghadapi era globalisasi dewasa ini, Kota Bandung memiliki berbagai keterbatasan baik yang menyangkut fisik kota, maupun sumber daya manusia, peraturan dan perundangan serta birokrasi pemerintahan.

Di bidang infrastruktur dan utilitas kota, saat ini terjadi ketidakseimbangan antara penyediaannya dengan dinamika aktivitas kota, sehingga tingkat pelayanannya menjadi tidak optimal. Dalam bidang sumber daya manusia, perlu dipersiapkan tenaga-tenaga yang dapat berkompetisi dengan tenaga-tenaga kerja dari luar negeri. Demikian pula dengan aspek peraturan dan perundang-undangan serta birokrasi belum sepenuhnya mendukung daya tarik investasi.

2. Menurunnya Daya Dukung Lingkungan

Tuntutan dan dinamika perkembangan kota telah menyebabkan kurang terkendalinya pengembangan kawasan-kawasan terbangun, sehingga menurunkan daya dukung lingkungan. Hal ini yang membatasi kemampuan lingkungan dalam penyediaan kebutuhan prasarana dan sarana dasar bagi wilayah permukiman. Berkurangnya potensi air baku baik dalam bentuk air bawah tanah maupun air permukaan pada kawasan lindung, serta pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang merupakan salah satu bentuk penurunan daya dukung lingkungan.

3. Terjadi Perubahan Perilaku Sosial dan Tatanan Nilai Masyarakat

Salah satu yang menjadi faktor penghambat dalam pembangunan adalah terjadinya perubahan perilaku sosial pada masyarakat kota seiring dengan tumbuhnya Bandung menjadi Kota Metropolitan yang mendorong masuknya arus informasi dan kebebasan individu yang datang dari luar, sehingga mengakibatkan menipisnya rasa kesetiakawanan sosial pada masyarakat yang dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan sosial.

4. Keterbatasan Kemampuan Pemerintah Kota

Kinerja pemerintah Kota Bandung dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Secara internal faktor-faktor keterbatasan sumber daya manusia, hambatan birokrasi dan keterbatasan kemampuan pembiayaan pembangunan merupakan kendala yang harus segera disikapi.

Kemampuan aparatur dalam menganalisis permasalahan yang terjadi dan akan berkembang di masyarakat merupakan tuntutan yang harus segera dipenuhi dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*). Demikian pula dengan permasalahan birokrasi terutama dalam bidang pelayanan perijinan harus menjadi prioritas pemerintah kota. Hal lain yang menjadi kendala pembangunan adalah adanya keterbatasan pembiayaan, efisiensi dan efektivitas pengelolaan APBD pemerintah kota.

5. Masalah Transportasi

Keterbatasan prasarana dan sarana transportasi serta kurang terkendalinya beberapa kegiatan perkotaan pada lokasi-lokasi tertentu merupakan penyebab utama masalah kemacetan lalu lintas di Kota Bandung. Kerusakan jalan, parkir di badan jalan serta pedagang kaki lima (PKL), pasar tumpah dan rendahnya disiplin pengguna jalan adalah penyebab lainnya dari kemacetan lalu lintas.

6. Masalah Banjir

Banjir merupakan salah satu kendala yang terjadi di Kota Bandung, karena topografinya yang berupa cekungan dan menurunnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi sebagai daerah resapan air. Salah satu wilayah yang menjadi prioritas pembangunan adalah kawasan Gedebage yang merupakan daerah genangan banjir. Berkaitan dengan hal tersebut, tahapan yang harus menjadi prioritas pertama dalam pembangunan kawasan Gedebage adalah penanganan masalah banjir.

C. Peluang

1. Terbukanya Peluang Kota untuk Investasi

Kota Bandung memiliki infrastruktur yang cukup lengkap. Hal ini ditunjukkan dengan keberadaan pusat-pusat pelayanan pendidikan, perdagangan, kesehatan, pemerintahan dan pelayanan sosial lainnya. Kondisi ini membuka peluang bagi pengembangan investasi.

2. Daerah Tujuan Wisata

Potensi kota yang bervariasi memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan sebagai produk wisata. Sejalan dengan meningkatnya aktivitas perdagangan dan jasa, kondisi ini diharapkan akan menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Dengan demikian terbuka peluang untuk mengembangkan Kota Bandung sebagai Daerah Tujuan Wisata.

3. Pengembangan Kota Konferensi

Secara historis Kota Bandung memiliki andil yang besar dalam penyelenggaraan konferensi Asia-Afrika. Momentum ini dapat membangun kesan bahwa Bandung merupakan kota konferensi berskala internasional. Kondisi ini sekaligus dapat dijadikan peluang untuk promosi penyelenggaraan konferensi sejenis.

4. Pengembangan Sister Cities

Kerjasama antara Kota Bandung dengan sejumlah kota lain di negara-negara sahabat merupakan peluang yang dapat dikembangkan, baik dalam rangka membangun kerjasama pendidikan, pemuda, olah raga, sosial dan budaya, maupun kerjasama dalam bidang ekonomi. Model kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan aktivitas pertukaran informasi, teknologi, perdagangan dan jasa antar kota bersahabat.

5. Pemanfaatan Peran sebagai Ibu Kota Propinsi Jawa Barat

Peran Kota Bandung sebagai ibu kota propinsi merupakan peluang yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur kota. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur kota ini tidak hanya dibebankan kepada pemerintah kota, melainkan juga Pemerintah Propinsi Jawa Barat serta Pemerintah Pusat.

6. Pengembangan Perekonomian

Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang didukung dengan kondusifitas dari berbagai aspek lingkungan, partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan kota merupakan peluang yang mendukung pembangunan. Demikian pula dengan makin meningkatnya bantuan keuangan dari pemerintah pusat dan propinsi akan menjadikan peluang pembiayaan dari sektor pemerintah.

7. Kota Pendidikan

Dikenalnya status Kota Bandung sebagai kota pendidikan, maka diharapkan akan menjadi peluang pada pengembang pembangunan berbasis intelektualitas, akademisi dan komunitas terdidik.

8. Kota Agamis

Masyarakat Bandung merupakan masyarakat dengan basis keyakinan dan kepatuhan beragama yang cukup kental. Hal tersebut dapat dilihat dari keberadaan tempat-tempat ibadah, lembaga keagamaan dan aktivitas keagamaan yang terdapat di seluruh bagian Kota, merupakan peluang untuk menjadikan agama sebagai bagian pengembangan Kota Bandung.

9. Kota Cendekiawan

Dengan keberadaan para cendekiawan, ilmuwan dan intelektual dalam berbagai disiplin keilmuan yang berada di Kota Bandung, merupakan peluang melahirkan gagasan dan pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan Kota Bandung bila dapat diwadahi secara profesional dan tepat.

D. Isu Strategis

Berdasarkan potensi, kendala dan tantangan, serta peluang dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis yang harus dihadapi dalam pelaksanaan pemerintahan kota Bandung dalam lima tahun ke depan yang bernuansakan terwujudnya kota Bandung yang BERMARTABAT. Adapun Isu-isu strategis tersebut meliputi:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

- a. Bagaimana meningkatkan sumber daya manusia (masyarakat dan aparatur pemerintah) agar dapat bersaing serta memiliki kompetensi yang direfleksikan dalam sikap, perilaku serta berkemampuan intelektualitas dan spiritualitas, sehingga terbentuk integritas yang didukung oleh pola disiplin yang baik dan amanah.

- b. Bagaimana memanfaatkan lembaga-lembaga pendidikan yang ada dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Bandung.

2. Perekonomian Kota

- a. Bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat yang berbasis pada potensi dan kemampuan lokal yang dilaksanakan adil;
- b. Bagaimana menciptakan daya tarik investasi dan iklim usaha yang mendorong terhadap perluasan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi kota;
- c. Bagaimana meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan.

3. Sosial Budaya

- a. Bagaimana meningkatkan sistem sosial yang mendukung rasa kesetiakawanan sosial di masyarakat;
- b. Bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam segenap proses pembangunan;
- c. Bagaimana memanfaatkan seluruh potensi masyarakat dalam menunjang pembangunan sosial budaya kota;
- d. Bagaimana meningkatkan upaya pengendalian mobilitas penduduk.

4. Penataan Kota

- a. Bagaimana menyediakan prasarana dasar perkotaan yang memadai bagi seluruh masyarakat kota;
- b. Bagaimana menyediakan prasarana ekonomi yang memadai untuk menarik investasi baru dan mendukung usaha yang ada, khususnya dalam pengembangan sistem transportasi;
- c. Bagaimana mengarahkan pembangunan kota ke kawasan timur kota agar terwujud pemerataan aktivitas kota;
- d. Bagaimana mengatasi permasalahan banjir pada kawasan-kawasan tertentu;
- e. Bagaimana memelihara prasarana kota agar sesuai dengan kebutuhan pelayanannya;
- f. Bagaimana mengurangi eksploitasi air tanah yang berlebihan dengan menjamin ketersediaan air bersih bagi industri dan rumah tangga;
- g. Bagaimana mengurangi polusi air, tanah, dan udara yang mengganggu kelestarian lingkungan hidup;
- h. Bagaimana memelihara dan meningkatkan kenyamanan kota;
- i. Bagaimana menyempurnakan sistem pengelolaan kebersihan kota yang efisien dan efektif.

5. Pemerintahan Kota

- a. Bagaimana mengembangkan pendekatan partisipatif guna melibatkan lebih banyak *stakeholders* dan mendorong inisiatif masyarakat dalam proses pembangunan;
- b. Bagaimana memberdayakan aparat pemerintah agar lebih profesional, akuntabel dan responsif pada kebutuhan dan tuntutan masyarakat;
- c. Bagaimana memperbaiki sarana dan prasarana fisik pemerintah guna menunjang pelayanan kepada masyarakat;
- d. Bagaimana meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Kota dan Pemerintah di kawasan metropolitan Bandung.

6. Keuangan Daerah

- a. Bagaimana mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih banyak melibatkan masyarakat;
- b. Bagaimana meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang profesional, akuntabel, efektif dan efisien dalam menunjang pelayanan prasarana dan sarana kota untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

VISI, MISI dan FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

A. VISI

Visi Kota Bandung dalam jangka waktu tahun 2004-2008 adalah ***Kota Bandung Sebagai Kota Jasa Yang BERMARTABAT (Bersih, Makmur, Taat dan Bersahabat).***

Untuk merealisasikan keinginan, harapan serta tujuan sebagaimana tertuang dalam visi yang telah ditetapkan, maka pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat Kota Bandung harus memahami akan makna dari visi tersebut, yaitu:

Pertama, Kota Bandung sebagai Kota Jasa harus bersih dari sampah, dan bersih praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), penyakit masyarakat (judi, pelacuran, narkoba, premanisme dan lainnya) dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya yang bertentangan dengan moral agama dan budaya masyarakat atau bangsa;

Kedua, Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang memberikan kemakmuran bagi warganya;

Ketiga, Kota Bandung sebagai Kota Jasa harus memiliki warga yang taat terhadap agama, hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan untuk menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban kota;

Keempat, Kota Bandung sebagai Kota Jasa harus memiliki warga yang bersahabat, santun, akrab dan dapat menyenangkan bagi orang yang berkunjung serta menjadikan kota yang bersahabat dalam pemahaman kota yang ramah lingkungan.

Secara harifiah, Bermartabat diartikan sebagai harkat atau harga diri, yang menunjukkan eksistensi masyarakat kota yang dapat dijadikan teladan karena kebersihan, kemakmuran, ketaatan, ketaqwaan dan kedisiplinannya. Jadi Kota Jasa yang bermartabat adalah kota yang menyediakan jasa pelayanan yang didukung dengan terwujudnya kebersihan, kemakmuran, ketaatan, ketaqwaan dan kedisiplinan masyarakatnya.

Berdasarkan pemahaman tersebut, sangatlah rasional pada kurun waktu lima tahun kedepan diperlukan langkah dan tindakan pemantapan (revitalisasi, reaktualisasi, reorientasi dan refungsionalisasi) yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung beserta masyarakatnya serta didukung secara politis oleh pihak legislatif melalui upaya-upaya yang lebih keras, cerdas dan terarah namun tetap ramah dalam meningkatkan akselerasi pembangunan guna tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

B. MISI

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan dalam lima tahun kedepan (2004-2008) yang bertumpu pada potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung jawab yang optimal dan proporsional dari seluruh komponen kota, maka **Misi** yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan religius, yang mencakup pendidikan, kesehatan dan moral keagamaan.

Misi ini memiliki makna bahwa dalam era globalisasi, masyarakat Kota Bandung harus berilmu, terampil dan sehat dan berdaya saing tinggi yang didukung dengan moral yang kuat dalam rangka mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

a. Tujuan

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia kota yang berilmu, terampil, sehat dan bermoral.

b. Sasaran

- 1) Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat kota;
- 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat kota;
- 3) Meningkatnya penerapan moral dalam segenap aktivitas kegiatan individu, keluarga, masyarakat dan aparatur pemerintah.

2. Mengembangkan perekonomian kota yang adil, yang mencakup peningkatan perekonomian kota yang tangguh, sehat dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

Misi ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap peningkatan kegiatan ekonomi akan berpengaruh pada peningkatan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang pada gilirannya akan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Maksudnya bahwa setiap potensi ekonomi yang dimiliki harus dimanfaatkan secara optimal dengan memperhatikan peluang-peluang yang ada guna kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

a. Tujuan

Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya ekonomi kota yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

b. Sasaran

- 1) Meningkatnya aktivitas usaha kecil, menengah dan besar di bidang perindustrian dan perdagangan;
- 2) Meningkatnya aktivitas usaha perkoperasian;
- 3) Meningkatnya penanaman modal/investasi;
- 4) Meningkatnya aktivitas usaha kepariwisataan;
- 5) Meningkatnya aktivitas penyediaan komoditas hasil-hasil pertanian yang berkualitas.

3. Mengembangkan Sosial Budaya Kota yang ramah dan berkesadaran tinggi, serta berhati nurani, yang mencakup peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan ketenagakerjaan, meningkatkan kesejahteraan sosial, keluarga, pemuda dan olah raga serta kesetaraan gender.

Misi ini didasarkan pada kondisi bahwa saat ini telah terjadi pergeseran perilaku yang mengarah pada rendahnya kepedulian masyarakat terhadap hal-hal yang terjadi di lingkungannya. Kondisi ini menyebabkan pula terjadinya penurunan rasa kesetiakawanan sosial, kecenderungan timbulnya sikap mental dan budaya permisif, mentolerir ketidakberesan, peningkatan kerawanan sosial dan rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan kota. Rendahnya kepedulian sosial tersebut pada akhirnya akan berdampak pula pada tidak optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan kota.

a. Tujuan

Meningkatkan pembentukan sikap dan perilaku masyarakat yang menunjang pembangunan kota.

b. Sasaran

- 1) Meningkatnya kesejahteraan, perlindungan dan keselamatan tenaga kerja;
- 2) Meningkatnya rasa kesetiakawanan sosial masyarakat;
- 3) Meningkatnya keluarga sejahtera;
- 4) Meningkatnya aktivitas kepemudaan yang menunjang kreativitas dan prestasi olah raga;
- 5) Terlestarikannya seni dan budaya daerah;
- 6) Menurunnya pengangguran angkatan kerja;

- 7) Meningkatnya kreativitas dan inovasi yang berorientasi pada peningkatan daya saing;
- 8) Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan;

4. Meningkatkan penataan kota, yang mencakup pemeliharaan serta peningkatan prasarana dan sarana kota agar sesuai dengan dinamika peningkatan kegiatan kota dengan tetap memperhatikan tata ruang kota dan daya dukung lingkungan kota.

Misi ini didasarkan pada kondisi bahwa prasarana dan sarana kota yang ada tidak sesuai dengan dinamika perkembangan kota. Kurangnya pelayanan air bersih dan air kotor, persampahan, kemacetan lalu lintas, ketidakteraturan sarana lalu lintas dan parkir, terjadinya banjir pada musim penghujan serta rusaknya jalan-jalan kota menunjukkan fenomena pentingnya dari misi ini.

Pelaksanaan misi yang keempat ini pada hakekatnya merupakan pengaturan pemanfaatan ruang kota, penyediaan infrastruktur dan upaya peningkatan mutu lingkungan agar sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku bagi kepentingan kegiatan kota.

a. Tujuan

Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan kota yang sesuai dengan potensi dan berwawasan lingkungan.

b. Sasaran

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur kota;
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan sistem transportasi kota;
- 3) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota;
- 4) Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan perumahan;
- 5) Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang kota.

5. Meningkatkan kinerja pemerintah kota secara profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, yang mencakup pemberdayaan aparatur pemerintah dan masyarakat.

Pemberdayaan aparatur pemerintah dikembangkan dalam rangka peningkatan kompetensi dan profesionalismenya sebagai pelayan masyarakat. Sedangkan pemberdayaan masyarakat merupakan upaya perwujudan iklim demokrasi dan peningkatan akses masyarakat terhadap berbagai informasi penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan pengendalian pembangunan.

Misi ini didasarkan atas kondisi obyektif bahwa kualitas pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah kepada masyarakat belum optimal, sehingga menyebabkan tidak optimalnya peran serta masyarakat dalam pembangunan kota.

a. Tujuan

Meningkatkan sistem pelayanan publik guna mendorong pertumbuhan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

b. Sasaran

- 1) Meningkatnya pelaksanaan penegakan hukum yang berkeadilan; khususnya pemberantasan KKN.
- 2) Meningkatnya pendidikan dan partisipasi politik masyarakat;
- 3) Terwujudnya kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah;
- 4) Terwujudnya ketertarikan dan ketertiban lingkungan masyarakat;
- 5) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan.

6. **Mengembangkan sistem keuangan kota**, yang mencakup sistem pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, swasta dan masyarakat.

Misi ini didasarkan bahwa suatu daerah dalam sistem pembiayaan terdiri atas: pertama, pembiayaan yang bersumber dari pemerintah sebagai kebijakan fiskal daerah dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kedua, pembiayaan yang bersumber dari swasta dan dunia usaha dalam bentuk investasi, dan ketiga, pembiayaan yang bersumber dari masyarakat dalam bentuk swadaya masyarakat. Peningkatan sistem pembiayaan yang dilaksanakan oleh ketiga aktor pembangunan ini akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota.

a. Tujuan

Meningkatkan sistem pembiayaan pembangunan kota.

b. Sasaran

- 1) Meningkatnya pendapatan daerah;
- 2) Meningkatnya kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan;
- 3) Meningkatnya efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas anggaran pendapatan dan belanja daerah.

C. FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Keinginan pemerintah dan masyarakat Kota Bandung untuk mewujudkan Kota Jasa yang bersih, makmur, taat dan bersahabat (BERMARTABAT) harus ditunjukkan dengan sikap dan perilaku serta komitmen yang kuat dari seluruh komponen kota. Komitmen ini dapat diwujudkan apabila didukung dengan kondusivitas kota baik dalam aspek ketentraman dan ketertiban, keberadaan prasarana dan sarana, serta komitmen pemerintah untuk menegakan supremasi hukum.

Dalam rangka mewujudkan komitmen tersebut di atas, maka diperlukan faktor-faktor pendukung yang menjadi faktor kunci keberhasilannya. Adapun faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut meliputi:

1. Komitmen yang kuat dari seluruh pelaku pembangunan baik unsur eksekutif, legislatif maupun komponen masyarakat, termasuk perguruan tinggi dan lembaga-lembaga atau pusat-pusat penelitian dan pengembangan IPTEK untuk membangun Kota Bandung;
2. Suasana dan situasi keamanan kota yang kondusif, baik untuk aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta meningkatkan daya tarik investasi kota;
3. Posisi Kota Bandung sebagai Ibukota Propinsi Jawa Barat yang memiliki tingkat aksesibilitas yang tinggi, dengan berbagai level pemerintahan serta dikenal luas oleh masyarakat internasional;
4. Adanya komitmen untuk menegakkan supremasi hukum; serta
5. Situasi dan kondisi perekonomian di tingkat regional dan nasional yang cukup baik, berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kota.

CARA PENCAPAIAN TUJUAN dan SASARAN (STRATEGI)

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian misi kota. Strategi diuraikan ke dalam arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang akan diimplementasikan dalam periode waktu tertentu.

Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan serta tindakan-tindakan tertentu yang mengandung persepsi dan tekanan khusus yang diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Perumusan kebijakan tidak lepas dari penilaian keterkaitan antara visi, misi dan isu-isu strategis yang telah ditentukan.

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas, dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan.

Adapun strategi yang akan dilaksanakan Pemerintah Kota Bandung dalam rangka pencapaian misi kota adalah sebagai berikut:

A. Strategi Dalam Rangka Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Religius

1). Kebijakan

Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan kesehatan serta pelayanan keagamaan bagi seluruh masyarakat.

2). Program-program pembangunan

a. Program Pendidikan Dasar dan Pra Sekolah

- 1) Tujuan
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan pendidikan dasar dan pra sekolah.
- 2) Sasaran
 - a) Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan MI, SLTP dan MTs;
 - b) Menurunnya Angka Putus Sekolah;
 - c) Terwujudnya manajemen pendidikan yang berbasis sekolah/ masyarakat;
 - d) Meningkatnya Angka Siswa yang melanjutkan sekolah ke tingkatan dan jenjang yang lebih tinggi;
 - e) Tertuntaskannya Wajib Belajar (Wajar) Dikdas 9 (sembilan) tahun.

b. Program Pendidikan Menengah

- 1) Tujuan
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan pendidikan menengah dan kejuruan.
- 2) Sasaran
 - a) Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMU dan SMK dan MA;
 - b) Menurunnya Angka Putus Sekolah;
 - c) Terwujudnya manajemen pendidikan yang berbasis sekolah/ masyarakat;
 - d) Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan sistem ganda pada sekolah-sekolah menengah kejuruan;
 - e) Meningkatnya Angka Siswa yang melanjutkan sekolah ke tingkatan dan jenjang yang lebih tinggi;
 - f) Terlaksananya Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun dalam mewujudkan Bandung Cerdas 2008.

c. Program Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah

1) Tujuan

Menyediakan pelayanan kepada masyarakat yang tidak dan atau belum sempat memperoleh pendidikan formal untuk mengembangkan diri, sikap, pengetahuan dan keterampilan, potensi pribadi, serta dapat mengembangkan usaha produktif guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

2) Sasaran

Meningkatnya potensi diri, pengetahuan dan keterampilan masyarakat.

d. Program Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

1) Tujuan

Meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2) Sasaran

- a) Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur peneliti;
- b) Meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil penelitian;
- c) Meningkatnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian.

e. Program Lingkungan Sehat, Perilaku Sehat dan Pemberdayaan Masyarakat

1) Tujuan

Mengembangkan perilaku hidup sehat dan lingkungan sehat serta memberdayakan masyarakat dalam memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatannya sendiri dan lingkungannya menuju masyarakat sehat, mandiri dan produktif.

2) Sasaran

- a) Meningkatnya kualitas Sarana Air Bersih (SAB), jamban keluarga dan rumah sehat dalam mewujudkan kondisi lingkungan sehat;
- b) Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) masyarakat dan peranserta aktif dalam memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatan diri serta lingkungan;
- c) Menurunnya penderita HIV dan AIDS.

f. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

1) Tujuan

Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

2) Sasaran

- a) Menurunnya Angka Kematian Bayi, Ibu Hamil dan Melahirkan;
- b) Menurunnya Angka Kesakitan;
- c) Menurunnya wabah penyakit menular;
- d) Menurunnya Angka Kematian yang disebabkan oleh berbagai penyakit;
- e) Meningkatnya jangkauan pelayanan kesehatan pada masyarakat terutama kepada masyarakat kurang mampu.

g. Program Pengawasan Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya

1) Tujuan

Meningkatkan perlindungan masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan kesalahgunaan obat, makanan dan bahan berbahaya lainnya.

2) Sasaran

- a) Terkendalinya penyalahgunaan obat terlarang dan NAPZA;
- b) Terbinanya industri makanan dan minuman.

h. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama

- 1) Tujuan
Mengembangkan sistem pelayanan kehidupan keagamaan.
- 2) Sasaran
 - a) Tersedianya SDM tenaga penyuluh agama yang berkualitas;
 - b) Terpenuhinya prasarana dan sarana keagamaan umat beragama untuk menjalankan ibadahnya;
 - c) Terwujudnya sistem kelembagaan dan manajemen pelayanan keagamaan;
 - d) Terwujudnya peran dan partisipasi lembaga keagamaan (Ponpes, DKM, MUI, PGI, Majelis Ta'lim dan lainnya) dalam meningkatkan pemberdayaan umat;
 - e) Terwujudnya pelayanan ibadah haji dan pengelolaan zakat;
 - f) Terwujudnya kehidupan keluarga yang harmonis;
 - g) Terwujudnya hubungan sinergis antar lembaga keagamaan dengan pemerintah kota.

i. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama

- 1) Tujuan
Meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama bagi siswa (TK, SD, SLTP, SMU, SMK) guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta pembinaan akhlak mulia dan berbudi pekerti luhur.
- 2) Sasaran
 - a) Tersedianya SDM pendidikan yang berkualitas dan pantas diteladani;
 - b) Meningkatnya sikap mental anak didik yang baik dalam kehidupan sehari-hari;
 - c) Menurunnya Angka Kenakalan Anak Sekolah;
 - d) Menurunnya pelanggaran etika dan moral yang dilakukan anak sekolah.

B. Strategi Dalam Rangka Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Adil

1. Kebijakan

Mengupayakan peningkatan kegiatan perekonomian kota yang berbasis potensi daerah.

2. Program-program pembangunan

a. Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Industri

- 1) Tujuan
Meningkatkan pembinaan dan pengembangan usaha industri yang berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan perekonomian kota.
- 2) Sasaran
 - a) Meningkatnya kualitas dan kuantitas usaha industri yang memiliki daya saing serta dapat meningkatkan penyediaan lapangan kerja;
 - b) Terkendalinya kegiatan industri yang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan;
 - c) Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri.

b. Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan

- 1) Tujuan
Meningkatkan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan dalam rangka peningkatan perekonomian kota.
- 2) Sasaran
 - a) Meningkatnya kegiatan usaha jasa perdagangan;
 - b) Meningkatnya kegiatan ekspor;
 - c) Meningkatnya ketersediaan barang-barang kebutuhan masyarakat kota yang aman konsumsi dan terjangkau;
 - d) Terwujudnya sistem informasi perdagangan.

c. Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Koperasi

1) Tujuan

Meningkatkan pembinaan dan pengembangan usaha koperasi dalam rangka meningkatkan perekonomian kota.

2) Sasaran

- a) Meningkatnya lembaga koperasi aktif yang sehat;
- b) Meningkatnya peranan koperasi dalam penyediaan barang dan jasa bagi anggotanya;
- c) Meningkatnya kesejahteraan anggota.

d. Program Pembinaan Usaha Kecil

1) Tujuan

Meningkatkan kemampuan usaha kecil agar memiliki daya saing usaha.

2) Sasaran

- a) Meningkatnya kemampuan usaha kecil dalam proses produksi, distribusi dan pemasaran;
- b) Meningkatnya kemandirian usaha kecil;
- c) Meningkatnya daya saing usaha kecil;
- d) Meningkatnya kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah dan besar.

e. Program Peningkatan Investasi Kota

1) Tujuan

Meningkatkan kegiatan investasi dalam menunjang perekonomian kota yang berdampak pada peningkatan lapangan kerja.

2) Sasaran

- a) Meningkatnya daya tarik investasi kota;
- b) Terbangunnya sistem informasi potensi investasi;
- c) Meningkatnya pelayanan investasi;
- d) Meningkatnya nilai dan jumlah penanaman modal dalam negeri dan asing.

f. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

1) Tujuan

Meningkatkan popularitas Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata melalui promosi wisata baik di dalam maupun ke luar negeri.

2) Sasaran

- a) Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara;
- b) Berkembangnya usaha kepariwisataan;
- c) Terbangunnya sistem informasi kepariwisataan.

g. Program Pengembangan Produk Kepariwisata

1) Tujuan

Meningkatkan keragaman dan obyek wisata dalam rangka menunjang usaha kepariwisataan.

2) Sasaran

- a) Meningkatnya keragaman dan daya tarik obyek wisata dalam rangka menunjang usaha kepariwisataan;
- b) Meningkatnya prasarana dan sarana obyek wisata;
- c) Terwujudnya usaha pariwisata yang berwawasan lingkungan.

h. Program Pengembangan Agrobisnis

1) Tujuan

Mengembangkan kegiatan agrobisnis perkotaan.

2) Sasaran

- a) Tersedianya produk pertanian yang berkualitas dan memenuhi standar kesehatan;
- b) Terdistribusinya kebutuhan produk pertanian;
- c) Meningkatnya kegiatan usaha jasa pertanian.

C. Strategi Dalam Rangka Mengembangkan Sosial Budaya Kota Yang Ramah dan Berkesadaran Tinggi serta Berhati Nurani

1. Kebijakan

Mendorong peningkatan integrasi, ketahanan dan kepedulian sosial masyarakat.

2. Program-program pembangunan

a. *Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Kerukunan Hidup Umat Beragama*

1) Tujuan

Menciptakan suasana kehidupan keagamaan secara kondusif bagi upaya pendalaman dan penghayatan agama serta pengamalan ajaran agama.

2) Sasaran

- a) Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama bagi individu, keluarga, masyarakat dan aparatur pemerintah;
- b) Terciptanya dasar-dasar kerukunan hidup intern dan antar umat beragama, serta antara umat beragama dengan pemerintah;
- c) Terwujudnya harmoni sosial, integrasi sosial dan persatuan bangsa.

b. *Program Pembinaan, Pengembangan Produktivitas dan Perlindungan Tenaga Kerja*

1) Tujuan

Meningkatkan kemampuan, perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja.

2) Sasaran

- a) Meningkatnya kesejahteraan pekerja dan keluarganya;
- b) Menurunnya pengangguran penduduk angkatan kerja;
- c) Meningkatnya keterampilan dan produktivitas pekerja;
- d) Meningkatnya jaminan hubungan kerja.

c. *Program Pelayanan, Rehabilitasi dan Partisipasi Sosial*

1) Tujuan

Meningkatkan pelayanan, rehabilitasi dan partisipasi sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.

2) Sasaran

- a) Meningkatnya rasa kesetiakawanan sosial;
- b) Berkurangnya penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- c) Menurunnya/berkurangnya jumlah penduduk miskin.

d. *Program Pemberdayaan Perempuan*

1) Tujuan

Meningkatkan kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan.

2) Sasaran

- a) Meningkatnya peran perempuan dalam aktivitas keluarga, masyarakat, pembangunan dan pemerintahan;
- b) Menurunnya tindak kekerasan pada perempuan.

e. *Program Pelayanan Kependudukan*

1) Tujuan

Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, pengendalian penduduk dan peningkatan keluarga sejahtera.

2) Sasaran

- a) Meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki identitas kependudukan;
- b) Terkendalinya pertumbuhan penduduk secara alamiah;
- c) Meningkatnya kegiatan pengendalian mobilitas penduduk;
- d) Meningkatnya keluarga sejahtera.

f. Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga

- 1) Tujuan
Mengembangkan kreativitas pemuda yang positif dan konstruktif.
- 2) Sasaran
 - a) Meningkatnya aktivitas kepemudaan yang menunjang perilaku kreatif, inisiatif dan partisipatif dalam pengembangan budaya;
 - b) Meningkatnya prestasi cabang-cabang olah raga.

g. Program Pengembangan Seni Budaya Daerah

- 1) Tujuan
Mengupayakan pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah yang dapat menunjang kepariwisataan.
- 2) Sasaran
 - a) Terpelihara dan lestari seni budaya daerah yang menunjang pengembangan kepariwisataan;
 - b) Terwujudnya dan tergalinya budaya daerah yang dapat mawadahi dan menangkal dampak negatif arus globalisasi;
 - c) Meningkatnya prasarana dan sarana seni budaya yang representatif;
 - d) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya daerah;
 - e) Meningkatnya apresiasi budaya daerah.

D. Strategi Dalam Rangka Meningkatkan Penataan Kota

1. Kebijakan

Mengupayakan perluasan dan pemerataan pelayanan prasarana dan sarana kota serta pengembangan aktivitas kota yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

2. Program-program pembangunan

a. Program Pengembangan Kawasan Gedebage

- 1) Tujuan
Meningkatkan pemerataan aktivitas perkotaan ke kawasan Timur Kota Bandung.
- 2) Sasaran
 - a) Tersusunnya rencana pengembangan kawasan Gedebage secara komprehensif;
 - b) Terbangunnya prasarana dan sarana penunjang/ pendukung pengembangan kawasan Gedebage.

b. Program Penataan Prasarana dan Sarana Kota

- 1) Tujuan
Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana kota sesuai dengan dinamika aktivitas kota.
- 2) Sasaran
 - a) Meningkatnya pelayanan prasarana kebinamargaan, keciptakaryaannya serta drainase dan pengairan;
 - b) Meningkatnya ketertiban dan keserasian pelayanan sarana kota.

c. Program Penataan Transportasi Kota

- 1) Tujuan
Meningkatkan pengelolaan sistem transportasi terpadu sesuai dengan peningkatan kebutuhan pelayanan transportasi perkotaan.
- 2) Sasaran
 - a) Meningkatnya upaya pengaturan faktor-faktor penghambat kelancaran arus lalu lintas;
 - b) Tersedianya Terminal angkutan penumpang umum yang representatif, gedung-gedung dan fasilitas parkir umum;

- c) Terwujudnya pemerataan jaringan pelayanan transportasi untuk aksesibilitas yang merata diseluruh wilayah Kota Bandung dengan menggunakan sistem jaringan laba-laba (*spider web*);
- d) Meningkatnya ketertiban jalur transportasi, penataan rute angkutan umum dan pengembangan Sistem Angkutan Umum Masal (SAUM).

d. Program Pengembangan dan Pengendalian Lingkungan Hidup

- 1) Tujuan
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
- 2) Sasaran
 - a) Terkendalinya pencemaran di bawah tanah, permukaan tanah dan di atas permukaan tanah;
 - b) Meningkatnya kualitas dan kuantitas lahan resapan air;
 - c) Meningkatnya prasarana dan sarana TPA serta pengolahan alternatif sampah/limbah;
 - d) Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemeliharaan taman-taman dan hutan-hutan kota;
 - e) Meningkatnya upaya-upaya pencegahan pengalihan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan mengembalikan secara bertahap fungsi RTH yang telah beralih fungsi;
 - f) Terwujudnya proporsi RTH.

e. Program Penataan Lingkungan Permukiman

- 1) Tujuan
Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.
- 2) Sasaran
 - a) Terwujudnya lingkungan permukiman sehat yang tertata secara serasi;
 - b) Berkembangnya sistem perumahan vertikal dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan.

f. Program Tata Ruang dan Penatagunaan Tanah

- 1) Tujuan
Mewujudkan pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Bandung.
- 2) Sasaran
 - a) Berkembangnya kegiatan-kegiatan pembangunan di pusat primer Gedebage;
 - b) Terkendalinya kegiatan-kegiatan di pusat primer inti pusat kota;
 - c) Terpeliharanya dan meningkatnya kawasan-kawasan yang berfungsi lindung.

g. Program Pengamanan dan Pendayagunaan Aset Pemerintah Kota

- 1) Tujuan
Mengamankan dan mendayagunakan aset-aset yang dimiliki Pemerintah Kota agar berdayaguna dan berhasil guna.
- 2) Sasaran
 - a) Terbentuknya basis data aset-aset pemerintah kota;
 - b) Terwujudnya penggunaan aset pemerintah kota yang dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

E. Strategi Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota Secara Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel

1. Kebijakan

Mengupayakan terjadinya peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan kota.

2. Program-program pembangunan

a. *Program Peningkatan Perencanaan Kota*

- 1) Tujuan
Meningkatkan kualitas produk perencanaan yang aspiratif, antisipatif aplikatif dan akuntabel.
- 2) Sasaran
 - a) Tersusunnya perencanaan umum jangka panjang, jangka menengah dan program kerja tahunan daerah;
 - b) Tersusunnya rencana-rencana detail teknis pembangunan fisik kota;
 - c) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

b. *Program Peningkatan Hukum*

- 1) Tujuan
Meningkatkan kesadaran hukum seluruh lapisan masyarakat.
- 2) Sasaran
 - a) Tersusunnya produk hukum daerah yang sesuai dengan kondisi dan potensi daerah serta menunjang pencapaian visi dan misi kota;
 - b) Terwujudnya penegakan hukum secara objektif dan adil.

c. *Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Aparatur Pemerintah Kota*

- 1) Tujuan
Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana aparatur pemerintah kota dalam mendukung pelayanan publik.
- 2) Sasaran
Meningkatnya kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana kerja aparatur pemerintah kota.

d. *Program Pengembangan Aparatur Pemerintah Kota*

- 1) Tujuan
Meningkatkan kualitas, kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah kota dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Sasaran
 - a) Meningkatnya kompetensi aparatur dalam pelayanan publik;
 - b) Meningkatnya profesionalisme aparatur untuk mendorong jiwa kewirausahaan aparatur;
 - c) Terwujudnya sistem penilaian atas uraian jabatan struktural dan fungsional di lingkungan pemerintah kota;
 - d) Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian di lingkungan pemerintah kota.

e. *Program Pengembangan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan*

- 1) Tujuan
Mewujudkan kelembagaan pemerintah yang rasional, kaya fungsi dan ramping struktur yang didukung dengan sistem kerja yang efektif dan efisien.
- 2) Sasaran
 - a) Meningkatnya optimalisasi pelaksanaan kewenangan pemerintah kota;
 - b) Terbentuknya organisasi pemerintah kota sesuai dengan kewenangan;
 - c) Terwujudnya sistem kerja perangkat daerah yang efisien dan efektif.

f. *Program Peningkatan Kualitas Pengawasan*

- 1) Tujuan
Meningkatkan kemampuan teknis dan administratif aparatur pengawasan dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan.
- 2) Sasaran
 - a) Terwujudnya aparatur pengawasan yang bersih berwibawa dalam rangka mengurangi kegiatan yang berindikasi KKN;
 - b) Tersedianya standar pengawasan yang efektif dan efisien;

- c) Meningkatnya sinergitas sistem pengawasan yang terkoordinasi dengan aparat pengawasan lainnya berdasarkan asas kesetaraan.

g. Program Pelayanan Prima

- 1) Tujuan
Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Sasaran
 - a) Terwujudnya sistem pelayanan prima;
 - b) Meningkatnya kepuasan masyarakat akan pelayanan pemerintah kota.

h. Program Peningkatan Partisipasi Politik

- 1) Tujuan
Meningkatkan perilaku demokratis dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Sasaran
 - a) Meningkatnya partisipasi politik masyarakat;
 - b) Meningkatnya peran partai politik dan kelompok kepentingan dalam pembangunan kota;
 - c) Meningkatnya kualitas pelaksanaan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi dan tata pemerintahan yang baik.

i. Program Pengembangan Kerjasama Antar Daerah dan Kota

- 1) Tujuan
Memantapkan peran dan kapasitas Pemerintah Kota dalam pengelolaan pembangunan melalui kegiatan kemitraan dengan kabupaten dan kota lain.
- 2) Sasaran
 - a) Meningkatnya peran pemerintah kota dalam melaksanakan kewenangan daerah otonom;
 - b) Meningkatnya kerjasama antar lembaga Pemerintah.

j. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Lingkungan

- 1) Tujuan
Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan stabilitas keamanan daerah.
- 2) Sasaran
 - a) Meningkatnya intensitas penertiban lingkungan;
 - b) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban lingkungan;
 - c) Meningkatnya peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda).

F. Strategi Dalam Rangka Mengembangkan Sistem Keuangan Kota

1. Kebijakan

Mendorong sistem keuangan kota yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

2. Program-program pembangunan

a. Program Peningkatan Sistem Pembiayaan Pembangunan

- 1) Tujuan
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan kota.
- 2) Sasaran
Tersusunnya sistem pembiayaan pembangunan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

b. Program Peningkatan Kinerja BUMD

- 1) Tujuan
Meningkatkan kinerja perusahaan daerah.
- 2) Sasaran
Meningkatnya kinerja perusahaan-perusahaan daerah.

c. Program Pengembangan Kemitraan

- 1) Tujuan
Meningkatkan kemitraan dengan masyarakat, swasta/dunia usaha dan pemerintah daerah/lembaga-lembaga lain dalam menunjang pembiayaan pembangunan kota.
- 2) Sasaran
 - a) Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan kota;
 - b) Meningkatnya sumber-sumber keuangan kota.

PENGUKURAN dan EVALUASI KINERJA

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan untuk berperan sebagai mekanisme dalam memberikan penghargaan atau hukuman, akan tetapi berperan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Indikator-indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan meliputi : (1) indikator masukan, (2) Indikator keluaran, (3) Indikator hasil, (4) Indikator manfaat, dan (5) Indikator dampak.

Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumberdaya manusia, informasi, kebijakan atau peraturan perundang-undangan.

Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non-fisik. Indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah atau efek langsung. Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan pengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakana program dan kegiatan yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Evaluasi kinerja dimaksudkan untuk melihat tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan merupakan analisis serta interpretasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja. Evaluasi kinerja bertujuan agar dapat mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dan kegiatan, guna perbaikan pelaksanaan kegiatan, program dan kegiatan guna perbaikan pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan di masa yang akan datang.

Oleh karena itu evaluasi kinerja sebagai suatu proses umpan balik atas kinerja yang lalu untuk mendorong produktivitas di masa yang akan datang meliputi (1) Evaluasi kinerja kegiatan, (2) Evaluasi kinerja program dan (3) Evaluasi kinerja kebijakan.

Evaluasi kinerja kegiatan dimaksudkan untuk memberi penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis, serta dilakukan sesuai dengan indikator kinerja dan capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan dengan melihat kesesuaian antara program dan kegiatannya.

PENUTUP

Rencana Strategik (Renstra) Kota Bandung merupakan pedoman taktis strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan publik di Kota Bandung yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2004-2008. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Program-program dan indikasi kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) serta sebagai dasar penyusunan renstra badan/lembaga/dinas satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Keberhasilan pencapaian visi dan misi beserta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, sangat tergantung pada: pertama, komitmen segenap aparatur pemerintah yang didukung pihak legislatif dalam melaksanakan segenap program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan, kedua, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan pengendalian pembangunan.

Semoga rencana yang akan dilaksanakan dalam renstra ini akan dapat terwujud sesuai dengan harapan seluruh masyarakat kota.

Amin.

WALIKOTA BANDUNG

DADA ROSADA

Lampiran II : **PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG**
NOMOR : 06 TAHUN 2004
TENTANG
RENCANA STRATEJIK KOTA BANDUNG TAHUN 2004-2008
MATRIKS PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM

No	Arah Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja
1.	Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, kesehatan serta pelayanan keagamaan bagi seluruh masyarakat.	1. Program Pendidikan Dasar dan Pra Sekolah;	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan serta bantuan prasarana dan sarana kepada lembaga pendidikan pra sekolah; • Diklat bagi kepala dan guru-guru lembaga pendidikan pra sekolah; • Bantuan biaya pendidikan kepada masyarakat yang kurang mampu; • Peningkatan prasarana dan sarana pendidikan; • Diklat bagi kepala dan guru-guru lembaga pendidikan sekolah dasar; • Peningkatan manajemen pendidikan berbasis sekolah; • Penyelenggaraan pendidikan berbasis kompetensi dan MBS yang didukung pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dan muatan lokal; • Pengembangan kemitraan dengan stakeholder pendidikan; • Penggabungan sekolah dasar yang didukung dengan pemerataan kualitas tenaga kependidikan; • Pengembangan kepastakaan sekolah; • Peningkatan tertib administrasi pendidikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan MI, SLTP dan MTs; • Menurunnya angka putus sekolah; • Terwujudnya manajemen pendidikan yang berbasis sekolah/masyarakat; • Meningkatnya Angka siswa yang melanjutkan sekolah ke tingkatan dan jenjang yang lebih tinggi; • Tertuntaskannya Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan Dasar (Dikdas) 9 (sembilan) tahun; • Meningkatnya prasarana dan sarana pendidikan pra sekolah dan sekolah dasar; • Meningkatnya bantuan bagi keluarga kurang mampu.

		<p>2. Program Pendidikan Menengah;</p> <p>3. Program Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan prasarana dan sarana pendidikan; • Diklat bagi kepala dan guru sekolah menengah dan kejuruan; • Peningkatan manajemen berbasis sekolah; • Peningkatan penyelenggaraan pendidikan berbasis kompetensi dan MBS yang didukung dengan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dan muatan lokal; • Pengembangan kemitraan dengan stakeholder pendidikan; • Bantuan biaya pendidikan kepada masyarakat yang kurang mampu; • Pemerataan kualitas tenaga kependidikan; • Pengembangan kepastakaan daerah; • Peningkatan tertib administrasi pendidikan; • Pengembangan kegiatan <i>link and macth</i> antara dunia pendidikan dengan dunia industri (DUDI). <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kejar paket A, B dan C; • Pembinaan generasi muda; • Pelatihan kegiatan Paskibra, Pramuka, PMR, UKS, Lomba Tata Upacara Bendera dan Pemilihan Siswa Teladan; • Peningkatan kelompok belajar; • Pembinaan pemuda produktif; • Pembinaan kursus-kursus rumpun kesehatan, jasa dan rumah tangga; • Peningkatan pusat belajar mengajar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMU, SMK dan MA; • Menurunnya Angka Putus Sekolah; • Terwujudnya manajemen pendidikan yang berbasis sekolah/masyarakat; • Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan sistem ganda pada sekolah-sekolah menengah kejuruan; • Meningkatnya Angka siswa yang melanjutkan sekolah ke tingkatan/jenjang yang lebih tinggi; • Terlaksananya/terselenggaranya Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun dalam mewujudkan Bandung Cerdas 2008; • Meningkatnya prasarana dan sarana pendidikan tingkat menengah; • Meningkatnya bantuan kepada siswa yang berprestasi. <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya potensi diri, pengetahuan dan keterampilan masyarakat;
--	--	---	---	--

		<p>4. Program Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;</p> <p>5. Program Lingkungan Sehat, Perilaku Sehat dan Pemberdayaan Masyarakat;</p> <p>6. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat perguruan-perguruan tinggi; • Diklat teknis peneliti; • Penyusunan rencana pemanfaatan hasil-hasil penelitian. <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kegiatan promosi kesehatan dan sanitasi di tingkat individu, keluarga dan masyarakat; • Peningkatan kesadaran perilaku dan pemberdayaan kesehatan serta kebersihan masyarakat; • Peningkatan lingkungan perumahan dan permukiman; • Peningkatan kesehatan lingkungan dan sanitasi tempat-tempat umum (TTU), tempat makanan dan minuman (TPM), rumah sakit (RS) dan industri; • Peningkatan kepedulian terhadap perilaku bersih dan sehat; • Peningkatan pencegahan bahaya NAPZA dan HIV; <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan serta rehabilitasi prasarana dan sarana pelayanan kesehatan; • Peningkatan ketersediaan obat dan alat kesehatan; • Peningkatan mutu tenaga kesehatan (medis, paramedis dan non medis); • Peningkatan mutu pelayanan kesehatan; 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur peneliti; • Meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil penelitian; • Meningkatnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian. <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kualitas Sarana Air Bersih (SAB), Jamban keluarga dan rumah sehat dalam mewujudkan kondisi lingkungan sehat; • Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) masyarakat dan peranserta aktif dalam memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatan diri serta lingkungan; • Menurunnya penderita HIV dan AIDS. <ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya Angka Kematian Bayi, Ibu Hamil dan melahirkan; • Menurunnya Angka Kesakitan; • Menurunnya Wabah Penyakit Menular; • Menurunnya Angka Kematian yang disebabkan oleh berbagai penyakit; • Meningkatnya jangkauan pelayanan kesehatan pada masyarakat terutama kepada masyarakat kurang mampu; • Meningkatnya usaha pelayanan kesehatan masyarakat; • Menurunnya status gizi buruk pada bayi & balita.
--	--	---	--	--

		<p>7. Program Pengawasan Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya;</p> <p>8. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian bantuan kesehatan kepada masyarakat yang kurang mampu dan miskin; • Pengamatan dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular; • Pencegahan penyakit melalui imunisasi; • Pemberantasan dan penanggulangan penyakit; • Peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat; • Peningkatan status gizi masyarakat. <ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian dan pembinaan penyaluran / Penurunan obat terlarang; • Penanggulangan NAPZA; • Pembinaan industri makanan dan minuman. <ul style="list-style-type: none"> • Bantuan untuk pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana peribadatan dan tempat kegiatan ibadah; • Penyediaan prasarana dan sarana penerangan keagamaan; • Pembinaan pemahaman dan pengamalan kegiatan keagamaan yang telah diperdakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terkendali penyalahgunaan obat terlarang dan NAPZA; • Terbinanya industri makanan dan minuman. <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya SDM tenaga penyuluh agama yang berkualitas; • Terpenuhinya prasarana dan sarana keagamaan umat beragama untuk menjalankan ibadahnya; • Terwujudnya sistem kelembagaan dan manajemen pelayanan keagamaan; • Terwujudnya peran dan partisipasi lembaga keagamaan (Ponpes, DKM, MUI, PGI, Majelis Ta'lim dan lainnya) dalam meningkatkan pemberdayaan umat; • Meningkatnya pelayanan ibadah haji dan pengelolaan pengelolaan zakat; • Terwujudnya keluarga yang harmonis; • Terwujudnya hubungan sinergis antar lembaga keagamaan dengan pemerintah kota.
--	--	---	---	--

2.	Mengupayakan peningkatan kegiatan perekonomian kota yang berbasis potensi daerah	<p>9. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama.</p> <p>1. Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Industri;</p> <p>2. Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyempurnaan materi pendidikan agama; • Pemasukan muatan budi pekerti yang terintegrasi dalam mata pelajaran yang relevan dengan kurikulum pendidikan; • Peningkatan kualitas guru-guru agama; • Peningkatan metode dan proses proses pendidikan agama. <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kemampuan SDM pelaku IKM melalui bimbingan teknis dan diklat; • Peningkatan bantuan biaya operasional IKM (industri kecil dan menengah); • Pengendalian kegiatan usaha industri melalui administrasi perijinan; • Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna; • Penataan sentra-sentra industri. <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jangkauan pemasaran melalui promosi (booklet, leaflet), gelar, temu usaha, pameran, misi dagang serta perluasan informasi pasar melalui jaringan internet; • Peningkatan kemampuan SDM pelaku usaha perdagangan melalui bimbingan teknis dan diklat; • Peningkatan pengawasan mutu barang yang beredar; • Peningkatan pemantauan/monitoring serta pelayanan informasi harga bagi masyarakat; 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya SDM pendidikan yang berkualitas; • Menurunnya angka kenakalan anak sekolah; • Menurunnya pelanggaran etika dan moral yang dilakukan anak sekolah; • Meningkatnya sikap mental anak didik yang baik dalam kehidupan sehari-hari. <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kualitas dan kuantitas usaha industri yang memiliki daya saing serta dapat meningkatkan penyediaan lapangan kerja; • Terkendalnya kegiatan industri yang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan; • Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri. <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kegiatan usaha di bidang jasa perdagangan; • Meningkatnya kegiatan ekspor; • Terpenuhinya ketersediaan barang-barang kebutuhan masyarakat yang aman konsumsi dan terjangkau; • Terbangunnya sistem informasi perdagangan; • Meningkatnya penataan pada pasar tradisional.
----	--	---	--	--

		<p>3. Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Koperasi;</p> <p>4. Program Pembinaan Usaha Kecil;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan data base perdagangan dan system informasi pasar; • Pengembangan system distribusi barang dan jasa; • Pengembangan pola kemitraan yang sinergis dan saling menguntungkan antara pasar tradisional dan pasar moderen; • Penataan sentra-sentra perdagangan; • Pembangunan jaringan system informasi produk-produk unggulan guna mendorong pemasaran local, nasional dan ekspor; • Peningkatan fasilitas dan utilitas pasar; • Peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum para pedagang. <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dan pemantapan kelembagaan koperasi; • Peningkatan kualitas SDM pembina dan pengurus koperasi; • Peningkatan kemampuan permodalan; • Pengembangan usaha koperasi. <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas SDM UKM; • Peningkatan akses permodalan; • Peningkatan akses/perluasan jangkauan pemasaran; • Pembinaan teknis bagi usaha kecil; • Perluasan jaringan usaha kecil; • Peningkatan pola kemitraan dengan pelaku ekonomi lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya jumlah lembaga koperasi yang aktif; • Meningkatnya jumlah pemanfaatan modal sendiri pada koperasi; • Meningkatnya jumlah anggota koperasi; • Meningkatnya peranan koperasi dalam penyediaan barang dan jasa bagi anggotanya; • Meningkatnya kesejahteraan anggota. <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kemampuan usaha kecil dalam proses produksi dan pemasaran; • Meningkatnya kemamdirian usaha kecil; • Meningkatnya daya saing usaha kecil; • Meningkatnya kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah dan besar.
--	--	---	---	--

		<p>5. Program Peningkatan Investasi Kota;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan prima dalam perijinan investasi; • Pelaksanaan kemitraan dalam pembangunan sarana dan prasarana kota; • Promosi potensi investasi terpadu dan komprehensif melalui pameran di dalam dan luar negeri serta melalui teknologi internet; • Deregulasi peraturan perijinan yang mengarah pada system pelayanan prima; • Peningkatan kerjasama dalam pengembangan penanaman modal; • Peningkatan pengawasan dan pengendalian penanaman modal secara berkala dan berkesinambungan; • Penyusunan sistem informasi yang terintegrasi dan mudah diakses; • Penyusunan peta profil dan basis data investasi berdasarkan prioritas daerah dan prospek pasar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya hambatan intern pada investasi kota; • Tersedianya prosedur investasi yang lebih efisien dan efektif; • Meningkatnya nilai dan jumlah penanaman modal dalam negeri dan asing; • Terwujudnya sistem informasi potensi investasi; • Meningkatnya pelayanan investasi; • Meningkatnya daya tarik investasi kota.
		<p>6. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengkajian pengembangan promosi wisata; • Menjalni kerjasama dengan pelaku usaha pariwisata; • Menggiatkan kegiatan promosi kepariwisataan melalui berbagai media secara nasional dan internasional; • Pembangunan jaringan kepariwisataan global secara efektif dan terorganisasi; • Pengembangan sistem informasi sarana wisata. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara; • Berkembangnya usaha kepariwisataan. • Meningkatnya kualitas SDM dalam bidang kepariwisataan; • Meningkatnya usaha pariwisata yg berwawasan lingkungan; • Terbangunnya sistem informasi kepariwisataan.

		<p>7. Program Pengembangan Produk Kepariwisataaan;</p> <p>8. Program Peningkatan Agrobisnis.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan pagelaran kepariwisataan yang bernuansa seni budaya; • Pelaksanaan kerjasama dengan pelaku usaha kepariwisataan untuk memenuhi standar umum kepariwisataan. <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan peningkatan usaha jasa pertanian; • Melaksanan penyuluhan dan pembinaan usaha pertanian; • Melaksanakan pelayanan kesehatan dan pengelolaan komoditas peternakan/Kesmavet; • Peningkatan inovasi agrobisnis; • Pemberdayaan kegiatan usaha pertanian; • Peningkatan prasarana dan sarana usaha pertanian; • Pengembangan sistem informasi dan promosi agrobisnis; • Pengembangan kemitraan di bidang usaha agrobisnis; • Monitoring dan pengendalian mutu produk pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya keragaman obyek wisata; • Meningkatnya daya tarik obyek wisata; • Terwujudnya penghargaan dan apresiasi terhadap kebudayaan dan kesenian; • Tersusunnya inventarisasi & dokumentasi warisan budaya dan seni; • Meningkatnya prasarana dan sarana kepariwisataan; • Terwujudnya usaha pariwisata yang berwawasan lingkungan. <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya produk pertanian yang berkualitas dan memenuhi standar kesehatan; • Tersedianya dan terdistribusikannya kebutuhan produk pertanian yang aman; • Meningkatnya penelitian, pengembangan dan jasa perdagangan agrobisnis; • Meningkatnya kegiatan usaha jasa pertanian;
--	--	--	---	--

<p>3.</p>	<p>Mendorong peningkatan integrasi dan ketahanan nasional masyarakat serta peningkatan rasa kepedulian sosial masyarakat.</p>	<p>1. Program Peningkatan Pemahaman, Pengamalan, dan Kerukunan Hidup Umat Beragama;</p> <p>2. Program Pembinaan, Pengembangan Produktivitas dan Perlindungan Ketenagakerjaan;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian penyuluhan dan bimbingan hidup beragama bagi masyarakat; • Peningkatan kualitas penyuluh, pembimbing, dai dan pemuka agama dan agamawan sebagai penggerak dinamisasi kehidupan beragama; • Pengembangan materi, metoda dan manajemen penyuluhan dan bimbingan keagamaan; • Pembinaan kerukunan hidup intern, antar umat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah; • Pemberdayaan lembaga keagamaan yang dapat mendukung upaya pemantapan tatanan sosial kemasyarakatan; • Peningkatan fungsi dan mutu sarana ibadah di sekolah sebagai pendukung pendidikan karakter/akhlak siswa. <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan produktivitas kerja; • Pembinaan perlindungan tenaga kerja; • Memberikan fasilitas dan kemudahan latihan kerja bagi para pekerja; • Pelaksanaan sosialisasi hubungan industrial; • Pembinaan LKS dan Bipartit; • Penyaluran dan pendayagunaan tenaga kerja; • Penyediaan dan pengembangan informasi pasar kerja; • Pengembangan lapangan usaha yang bersifat padat karya dan padat modal; • Pengembangan program transmigrasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama bagi individu, keluarga, masyarakat dan aparatur pemerintah; • Terciptanya dasar-dasar kerukunan hidup antarumat dan antara umat beragama; • Terwujudnya harmoni sosial, integrasi sosial dan persatuan bangsa; • Pembinaan kerukunan hidup. <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kesejahteraan pekerja dan keluarganya; • Menurunnya angka pengangguran penduduk angkatan kerja; • Meningkatnya keterampilan dan produktivitas pekerja; • Tersedianya tenaga kerja yang berkualitas, produktif dan berdaya saing tinggi; • Terjaminnya hubungan, kondisi, keselamatan dan kesehatan kerja; • Tersedianya informasi pasar kerja; • Meningkatnya jaminan dan perlindungan tenaga kerja.
-----------	---	---	---	---

		<p>3. Program Pelayanan, Rehabilitasi dan Partisipasi Sosial;</p> <p>4. Program Pemberdayaan Perempuan;</p> <p>5. Program Pelayanan Kependudukan;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial; • Pengawasan sistem informasi pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial • Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial; • Memfasilitasi tenaga masyarakat dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial; • Sosialisasi advokasi tindak kekerasan terhadap perempuan; • Pembinaan dan peningkatan kesejahteraan pekerja perempuan; • Pembinaan dan peningkatan kualitas dan peran perempuan. • Penyediaan pelayanan sistem informasi kependudukan yang efektif dan efisien; • Pemeliharaan dan pemutakhiran database penduduk kota Bandung; • Pelaksanaan sosialisasi dan implementasi kebijakan kependudukan secara terpadu; • Pengendalian penduduk pendatang dan orang asing (WNA); • Pengidentifikasi tingkat penyebaran urbanisasi non permanen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya rasa kesetiakawanan sosial; • Menurunnya jumlah penduduk miskin; • Menurunnya/berkurangnya penyandang masalah kesejahteraan sosial. • Meningkatnya peran perempuan dalam aktivitas keluarga, masyarakat, pembangunan, dan pemerintahan; • Menurunnya tindak kekerasan pada perempuan. • Meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki identitas kependudukan; • Terkendalinya pertumbuhan penduduk secara alamiah; • Meningkatnya keluarga sejahtera.
--	--	---	--	--

		<p>6. Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pembinaan peningkatan peran pemuda melalui pengembangan dan penyaluran bakat, minat, dan kreativitas generasi muda; • Pemberdayaan generasi muda melalui dorongan, bimbingan pendidikan dan pelatihan; • Pengembangan faktor pendorong kreasi, kreativitas dan inovasi untuk menunjang perkembangan kepemudaan menjadi satu kekuatan pembangunan; • Pelaksanaan pembinaan peningkatan peran olahraga melalui pengembangan dan penyaluran bakat, minat, dan kreativitas generasi muda; • Pemberdayaan generasi muda melalui dorongan, bimbingan pendidikan dan pelatihan olahraga; • Pengembangan prestasi olahraga untuk menunjang perkembangan olahraga sebagai salah satu kekuatan pembangunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya aktivitas kepemudaan yang menunjang perilaku kreatif, inisiatif dan partisipatif dalam pengembangan budaya; • Meningkatnya prestasi cabang-cabang olah raga; • Meningkatnya atlet-atlit berprestasi.
		<p>7. Program Pengembangan Seni Budaya Daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan organisasi atau lembaga-lembaga budaya daerah dalam mengusung kegiatan ataupun forum komunikasi pengembangan seni budaya lokal; • Penggalan potensi budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional; • Peningkatan pemahaman dan pelestarian seni budaya daerah melalui seminar, forum komunikasi, lokakarya seni & budaya daerah serta apresiasi seni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terpelihara dan terlestarikannya seni budaya daerah yang menunjang pengembangan kepariwisataan; • Terwujudnya dan tergalinya budaya daerah yang dapat mawadahi dan menangkal dampak negatif arus globalisasi; • Meningkatnya sarana dan prasarana seni budaya yang representatif; • Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya daerah; • Meningkatnya apresiasi budaya daerah.

4.	Mengupayakan perluasan dan pemerataan pelayanan prasarana dan sarana kota serta pengembangan aktivitas kota yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	<p>1. Program Pengembangan Kawasan Gedebage;</p> <p>2. Program Penataan Prasarana dan Sarana kota;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusun rencana pengembangan kawasan Gedebage; • Melakukan sosialisasi rencana pengembangan kawasan Gedebage; • Melakukan pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur kota; • Pembangunan akses tol Gedebage; • Pembangunan prasarana dan sarana pendukung pengembangan kawasan Gedebage. <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rencana detail pembangunan over pass dan jalan-jalan baru; • Pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan; • Pengendalian pendirian bangunan; • Penertiban bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya; • Penyusunan rencana penanganan banjir perkotaan; • Pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan saluran drainase, pengairan dan sungai; • Pembebasan tanah untuk normalisasi sungai dan infrastruktur lainnya; • Pembersihan sungai dan saluran; • Penataan dan penertiban ornamen kota; • Pengembangan sistem informasi dan forum diskusi dan komunikasi antara jaringan media massa, masyarakat, pelaku wirausaha dan pemerintah.; • Pemeliharaan dan peningkatan prasarana dan sarana pengendalian kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya rencana pengembangan kawasan Gedebage secara komprehensif; • Terbangunnya akses tol Gedebage; • Terbangunnya prasarana dan sarana penunjang/pendukung pengembangan kawasan Gedebage. <ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya desain-desain over pass dan jalan-jalan baru; • Meningkatnya kondisi jalan-jalan kota; • Meningkatnya kebersihan sungai dan saluran; • Meningkatnya pengolahan dan penyediaan air bersih untuk keperluan warga kota; • Berkurangnya lokasi-lokasi banjir; • Meningkatnya jumlah bangunan yang memiliki IMB; • Meningkatnya ketertiban sarana dan ornament kota; • Meningkatnya pelayanan penanggulangan kebakaran.
----	--	--	---	--

		<p>3. Program Pengembangan Penataan Transportasi kota;</p> <p>4. Program Pengembangan dan Pengendalian Lingkungan Hidup;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rencana penanganan transportasi kota; • Pemeliharaan ATCS; • Pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan; • Sosialisasi dan pendekatan dialogis mengenai tertib berkendara; • Pengawasan dan pengendalian lokasi parkir; • Penataan dan pengembangan terminal dan sub terminal; • Pengembangan system angkutan masal (SAUM). <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan penyuluhan kegiatan lingkungan hidup; • Penertiban dan pengendalian pemanfaatan air bawah tanah; • Pembuatan sumur resapan; • Peningkatan kali bersih; • Peningkatan kualitas dan kuantitas taman-taman kota; • Peningkatan kualitas dan kuantitas RTH; • Peningkatan penghijauan kota. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya intensitas pemeliharaan alat-alat pengatur lalu lintas; • Berkurangnya kemacetan; • Tersedianya Terminal angkutan penumpang umum, gedung-gedung dan fasilitas parkir umum; • Terwujudnya jaringan transportasi untuk pelayanan aksesibilitas yang merata diseluruh wilayah Kota Bandung dengan menggunakan sistem jaringan laba-laba (spider web). • Meningkatnya ketertiban jalur transportasi angkutan; • Terlaksananya penataan rute angkutan umum dan pengembangan Sistem Angkutan Umum Masal; • Terpeliharanya jaringan jalan kota yang baik; • Meningkatnya kerjasama antar unit kerja terkait dalam pengaturan jalur transportasi angkutan; • Menurunnya jumlah kecelakaan. <ul style="list-style-type: none"> • Terkendalinya pencemaran di bawah tanah, permukaan tanah dan di atas permukaan tanah; • Meningkatnya prasana dan sarana persampahan; • Tersedianya prasarana pengolahan alternatif sampah dan limbah; • Menurunnya timbulan sampah. • Meningkatnya kualitas lahan resapan air; • Meningkatnya pemahaman, rekomendasi dan perijinan di bidang lingkungan hidup; • Tertanganinya kasus-kasus pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup; • Meningkatnya intensitas pemeliharaan taman-taman kota dan hutan-hutan kota; • Meningkatnya upaya-upaya pencegahan pengalihan fungsi RTH; • Terwujudnya upaya-upaya proporsi RTH.
--	--	--	--	---

		<p>5. Program Pengembangan Pemukiman dan Penataan Prasarana dan sarana Lingkungan.</p> <p>6. Program Tata Ruang dan Penata-gunaan Tanah;</p> <p>7. Program Pengembangan dan Pengamanan Asset Pemerintah kota.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rencana pembangunan Rumah Susun; • Pengadaan lahan untuk pembangunan Rumah Susun; • Pembangunan Rumah Susun; • Revitalisasi kawasan perkotaan; <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rencana detail Tata Ruang Kota; • Penyusunan “<i>Zoning Regulation</i>”; • Pembuatan prosedur perizinan pemanfaatan ruang kota; • Pembuatan sistem informasi rencana Tata Ruang Kota; • Pelaksanaan tertib administrasi pertanahan. <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan basis data asset pemerintah kota; • Pengkajian dan pendayagunaan asset pemerintah kota; <p>Pengamanan dan pengawasan asset pemerintah kota.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Berkurangnya kawasan-kawasan kumuh; • Meningkatnya kondisi lingkungan permukiman sehat; • Meningkatnya jangkauan pelayanan air bersih; • Berkembangnya sistem perumahan vertikal dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan. <ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kegiatan-kegiatan pembangu-nan di pusat primer Gedebage; • Berkurangnya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukkan; • Meningkatnya proporsi RTH; • Terkendalinya kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota. <ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya basis data aset-aset pemerintah kota; • Terwujudnya aset pemerintah kota yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
--	--	---	---	--

5.	Mempunyai terjadinya peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan kota	<p>1. Program Peningkatan Hukum;</p> <p>2. Program Peningkatan Partisipasi Politik;</p> <p>3. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Pemerintah;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan tertib hukum dan hak asasi manusia; • Evaluasi terhadap produk-produk hukum agar sesuai dengan dinamika perkembangan kota; • Sosialisasi dan pendekatan dialogis produk-produk hukum baik daerah maupun nasional kepada masyarakat; • Pelayanan bantuan hukum dan pembinaan PPNS; • Publikasi serta penataan jaringan dokumenasi; • Penerbitan naskah akademik; • Perumusan dan penerbitan produk hukum. <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan sosialisasi tentang tugas, fungsi, dan wewenang partai politik; • Penyelenggaraan Pemilu 2004; • Pembinaan Organisasi Masyarakat dan Politik; • Terfasilitasinya sarana dan prasarana Parpol. <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur pemerintah kota. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya produk hukum daerah yang sesuai dengan kondisi, potensi daerah dan visi-misi kota; • Meningkatnya kesadaran hukum seluruh lapisan masyarakat; • Terwujudnya penegakan hukum secara objektif dan adil; • Ditetapkannya/disempurnakannya peraturan perundangan daerah yang lebih berkualitas.. <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya partisipasi politik masyarakat; • Meningkatnya peran partai politik dalam pembangunan kota; • Terjaminnya hak-hak politik masyarakat dalam melakukan partisipasi politiknya, tanpa tekanan dan ancaman dari pihak manapun; • Terwujudnya sarana dan prasarana Parpol; • Meningkatnya kualitas pelaksanaan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi dan tata pemerintahan yang baik. <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana kerja aparatur pemerintah kota.
----	--	---	---	---

		<p>4. Program Peningkatan Perencanaan Kota;</p> <p>5. Program Pengembangan Aparatur Pemerintah;</p> <p>6. Program Pelayanan Prima;</p> <p>7. Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dan kota;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah; • Menyusun Program Pembangunan Daerah; • Menyusun Rencana Kerja Tahunan Daerah; • Menyusun Rencana-rencana detil teknis pembangunan fisik kota. <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pendidikan dan pelatihan aparat pemerintah kota; • Membuat sistem informasi kepegawaian kota; • Melakukan analisis jabatan fungsional dan struktural. <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan petunjuk operasional dan prosedur tetap pelayanan perijinan; • Pembangunan sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan yang mudah diakses oleh masyarakat. <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dengan Kabupaten dan Kota yang berhubungan dengan pengaturan arus masuk-keluar kendaraan; • Penjajagan kerjasama dengan kota lain; • Melakukan kerjasama dalam pengelolaan sampah dengan kabupaten-kota; 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan; • Tersusunnya perencanaan umum jangka panjang, jangka menengah dan program kerja tahunan daerah; • Tersusunnya rencana-rencana detail teknis pembangunan fisik kota. <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kemampuan aparaturnya dalam pelayanan publik; • Meningkatnya persentasi tingkat produktivitas kerja PNS; • Tersedianya standar penilaian kinerja aparaturnya; • Meningkatnya profesionalisme aparaturnya yang mendorong jiwa kewirausahaan aparat; • Meningkatnya kualitas penyelenggaraan diklat; • Meningkatnya kesejahteraan pegawai pada aparaturnya di lingkungan pemerintah kota; • Terpenuhinya prosedur administrasi kepegawaian secara tepat waktu. <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kepuasan masyarakat akan pelayanan pemerintah kota; • Berkurangnya waktu pelaksanaan prosedur perijinan. <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya peran pemerintah kota dalam melaksanakan kewenangan daerah otonom; • Meningkatnya kerjasama antar lembaga Pemerintah dan non pemerintah.
--	--	---	---	--

		<p>8. Program Pengembangan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;</p> <p>9. Program Peningkatan Kualitas Pengawasan;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kerjasama yang bersifat inovatif dengan kabupaten-kota lain; • Kerjasama pembangunan prasarana kota di batas-batas wilayah kota-kabupaten. <ul style="list-style-type: none"> • Pengkajian atas kinerja dinas, badan, dan lembaga teknis daerah atas dasar kewenangan yang dimilikinya; • Penyusunan panduan tentang prosedur kerja bagi setiap unit kerja; • Penyusunan sistem kerja bagi setiap unit kerja; • Pengumpulan dan pemutakhiran database seluruh pegawai pada satuan-satuan unit kerja di lingkungan perangkat daerah pemerintah kota; • Pengumpulan dan pemutakhiran sistem dan data-data peraturan perundangan kelembagaan pemerintah kota. <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan secara intensif terhadap aparat pengawasan; • Penyusunan rencana kegiatan pengawasan yang terintegrasi dengan unit pengawasan lainnya; • Pengawasan secara intensif dan pengawasan secara fungsional; • Penyusunan standar kerja aparat pengawasan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya optimalisasi pelaksanaan kewenangan pemerintah kota; • Terbentuknya organisasi pemerintah kota sesuai dengan kewenangan; • Terwujudnya sistem kerja perangkat daerah yang efisien dan efektif; • Terwujudnya prosedur kerja yang baku bagi seluruh perangkat daerah. <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya aparat pengawasan yang handal, bersih, berwibawa dan profesional; • Berkurangnya kasus yang berindikasi KKN; • Tersedianya standar pengawasan yang efektif dan efisien; • Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran; • Menurunnya jumlah uang yang terindikasi Tindak Pidana Korupsi; • Meningkatnya persentase instansi dan aparat pemerintah yang melaksanakan akuntabilitas kinerja (AKIP) secara transparan; • Terwujudnya sistem pengawasan yang terkoordinasi dengan aparat pengawasan lainnya berdasarkan asas kesetaraan.
--	--	--	---	---

6.	Mendorong pertumbuhan dan pengembangan potensi pembiayaan pembangunan kota	<p>10. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Lingkungan.</p> <p>1. Program Peningkatan Sistem Pembiayaan Pembangunan;</p> <p>2. Program Peningkatan Kinerja BUMD;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan PKL; • Pelaksanaan operasional penertiban pelanggar Perda tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan lingkungan; • Pelaksanaan sosialisasi tentang peraturan yang mengandung sanksi; • Pelaksanaan sidang yustisi dan pendataan terhadap para pelanggar Perda. <ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya APBD yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel; • Meningkatnya pendapatan keuangan kota dari berbagai sumber. <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pelayanan perusahaan-perusahaan daerah; • Meningkatnya laba perusahaan-perusahaan daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya intensitas penertiban lingkungan; • Berkurangnya gangguan ketertiban umum; • Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban lingkungan; • Meningkatnya peran SatPol PP dan PPNS dalam menegakkan Perda. <ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya APBD yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel; • Meningkatnya pendapatan keuangan kota dari berbagai sumber. <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pelayanan perusahaan-perusahaan daerah; • Meningkatnya laba perusahaan-perusahaan daerah.
----	--	---	--	--

		3. Program Peningkatan dan pengembangan Kemitraan.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan kota; • Meningkatnya sumber-sumber keuangan kota. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan kota; • Meningkatnya sumber-sumber keuangan kota.
--	--	--	---	---

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

